

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah mendapatkan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengelola dan mengatur keuangan daerahnya sendiri. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun dan mempertanggungjawabkan laporan keuangannya. Laporan keuangan tersebut menunjukkan gambaran mengenai kondisi keuangan entitas dalam periode tertentu. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi, baik dalam pemanfaatan maupun pengelolaan sumber daya publik. (Nikmah, 2023)

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni melaporkan pemanfaatan sumber daya publik melalui laporan keuangan. Fungsi utama dari laporan keuangan adalah dapat memberikan informasi terkait data keuangan yang berguna bagi para pemakainya guna menilai dan membuat keputusan. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah perlu memperhatikan mutu dari laporan keuangan yang dihasilkan. Adapun standar untuk mengukur kualitas laporan keuangan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. (Nikmah, 2023)

Banyaknya temuan terkait permasalahan pada laporan keuangan menunjukkan perlu dilakukan upaya optimalisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan berfungsi untuk menyajikan informasi yang relevan dan andal terkait segala transaksi keuangan dan posisi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Adanya laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi guna memberikan kemudahan pada kegiatan operasional pemerintahan, menilai dan memberikan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaporan keuangan. (Ifanka & Sari, 2022)

Penelitian ini berfokus pada pentingnya optimalisasi kualitas laporan keuangan sebagai indikator utama dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan bukan hanya mencerminkan kinerja keuangan suatu entitas, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi optimalisasi kualitas laporan keuangan melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah membutuhkan sistem yang mampu menyediakan kemudahan dalam mengelola data dengan akurat, transparan, dan terstruktur untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Organisasi semakin banyak memasukkan sistem yang canggih ke dalam proses manajemen untuk lebih menyinkronkan operasi dengan tujuan strategis. Efektivitas sistem tersebut sering diukur sebagai keberhasilan yang

secara langsung memengaruhi hasil kinerja secara keseluruhan. (Oudah et al., 2025)

Dalam era yang semakin maju, sistem informasi yang andal dan berkualitas menunjukkan kunci utama sebuah kemajuan. Namun, dalam pemanfaatannya masih terdapat kendala atau tantangan dalam mengimplementasikannya seperti kondisi perangkat lunak dan perangkat keras, kondisi sumber daya, keterbatasan dana, dan pemutakhiran data. (Nurcholis & Sulistyowati, 2024)

Pemerintah daerah semakin bergantung pada sistem teknologi untuk operasi dan pelaporan keuangan untuk menunjukkan peningkatan efisiensi dan transparansi. Namun, penggunaan sistem teknologi harus dilakukan dengan baik, karena penggunaan sistem yang tidak efektif mengakibatkan lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi atau penyalahgunaan, yang diukur dalam hal keuangan dan kinerja. (Lebese & Motubatse, 2025)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 391, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi terkait pembangunan dan keuangan daerah yang dikelola secara terintegrasi. Sebagai bagian dari implementasi UU tersebut, Menteri Dalam Negeri kemudian menerbitkan Permendagri No.70 Tahun 2020 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pada pasal 1 ayat 12, disebutkan bahwa seluruh informasi tersebut dikompilasi dalam satu sistem yang dirancang untuk mempermudah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi, yang dikenal

dengan nama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). (Paat & Saleh, 2023)

Sistem ini dibuat untuk memberikan fasilitas terhadap integrasi data laporan keuangan secara bertahap serta disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah. SIPD termasuk salah satu komponen *e-government* yang memiliki peran krusial dalam perencanaan pembangunan daerah yang membuat pemerintahan peduli dengan isu lokal, mendorong keterlibatan masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi publik. SIPD menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan serta diharapkan mampu memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempermudah prosedur pelaporan dan mengintegrasikan data keuangan . (Timang et al., 2025)

Sementara itu, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih memiliki berbagai kendala dalam pengimplementasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) seperti kondisi perangkat keras, perangkat lunak, pemutakhiran data, server error. Data sering terjadi ketidaksesuaian dengan sistem dan hasil akhir sehingga mengharuskan verifikasi manual oleh pembuat laporan keuangan. Maka dalam melakukan pengelolaan keuangan dibutuhkan perangkat yang memadai untuk mendukung implementasi dari sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Simatupang, et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah telah memberikan manfaat seperti kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan, peningkatan terhadap regulasi keuangan, dan peningkatan

akurasi dan kecepatan pengolan data keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Septiana & Isnawaty (2024) yang menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah telah membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan membantu pengelolaan keuangan secara terstruktur.

Kualitas dari laporan keuangan membuktikan bahwa informasi yang disajikan dapat digunakan dengan tepat untuk pengendalian, perencanaan, atau pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas berguna dalam meminimalkan munculnya risiko kecurangan karena laporan keuangan termasuk bentuk transparansi pemerintah kepada publik. (Putri et al., 2025)

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah akan diawali dari tahap perencanaan yang menjadi tanggung jawab dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perencanaan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran daerah. Peran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dimulai dari tahap anggaran yaitu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah perbendaharaan yang mencakup pelaksanaan anggaran, pencairan dana, dan pengelolaan kas daerah. Tahap akhir adalah pelaporan yaitu penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran .

Tahapan - tahapan tersebut didukung oleh sistem yang sudah terintegrasi yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang menghubungkan proses penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan secara berkelanjutan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, dalam praktiknya implementasi SIPD masih menemui beberapa kendala pada setiap tahapan, khususnya di lingkup BKPAD Kota Blitar yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan.

Permasalahan implementasi SIPD pada bidang anggaran berkaitan dengan aspek teknis sistem dan integrasi data. Meskipun perbaikan sudah dilakukan secara bertahap, sistem masih sering mengalami kendala akses dan error yang menghambat proses penyusunan hingga penyesuaian anggaran. Peralihan dari sistem sebelumnya (SIPD Monolith) ke versi terbaru SIPD (SIPD Microservices) juga tidak berjalan dengan baik karena masih memerlukan penyesuaian ulang. Integrasi data antar tahapan belum sepenuhnya optimal seperti timbulnya ketidaksinkronan data dan munculnya data yang tidak relevan. Selain itu, terjadi keterbatasan dukungan teknis seperti lambatnya respon helpdesk yang membuat penyelesaian kendala menjadi kurang efektif sehingga harus bergantung pada inisiatif internal.

Pada bidang perbendaharaan, permasalahan bersifat operasional dan berdampak langsung pada proses keuangan daerah. Seringnya terjadi gangguan sistem dalam SIPD menyebabkan terhambatnya transaksi keuangan seperti penerbitan SP2D yang tidak dapat diproses. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya kewajiban yang harus dibebankan pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, masih ditemukan error dalam penginputan dan pembacaan data seperti data rekening yang tidak terdeteksi serta integrasi

SIPD dengan sistem eksternal yang belum optimal sehingga proses keuangan daerah kurang efisien.

Implementasi SIPD pada bidang pelaporan masih menghadapi kendala terutama terkait keterbatasan fitur dan stabilitas sistem. Modul pelaporan belum sepenuhnya dapat digunakan karena masih dalam tahap penyempurnaan dan belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan laporan sesuai regulasi. Sistem yang belum stabil dan sering mengalami gangguan juga menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Selain itu, beberapa laporan masih menggunakan sistem lama yaitu SIPKD sehingga terjadi dual system yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inkonsistensi data. Keterbatasan fleksibilitas dalam SIPD juga menyulitkan penyesuaian format laporan sesuai kebutuhan pemeriksa.

Secara keseluruhan, permasalahan implementasi SIPD tidak hanya terjadi pada tahap pelaporan saja, tetapi juga pada tahap penganggaran dan perbendaharaan yang saling terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengoptimalan kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh proses pelaporan saja, namun juga berkaitan pada proses dan kualitas data pada tahap sebelumnya.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut adalah ringkasan permasalahan implementasi SIPD pada BPKAD Kota Blitar

Tabel 1.1
Permasalahan Implementasi SIPD
pada BPKAD Kota Blitar

Bidang	Permasalahan	Bentuk Kendala	Dampak
ANGGARAN	Stabilitas sistem belum optimal	Akses sulit dan error sistem	Hambatan dalam penyusunan dan penyesuaian anggaran
	Integrasi data belum sempurna	Data antar tahapan tidak sinkro	Risiko kesalahan data dan keterlambatan proses
	Adaptasi SIPD Monolith ke SIPD Microservices	Butuh penyesuaian ulang terhadap sistem baru	Efektivitas penggunaan belum optimal
	Dukungan teknis terbatas	Respon helpdesk lambat	Penyelesaian masalah tidak cepat
PERBENDAHARAAN	Gangguan sistem pada proses transaksi	SP2D gagal terproses, error input data	Penundaan pembayaran yang memunculkan utang
	Ketergantungan pada jaringan dan sistem	Akses lambat atau terhambat	Proses pencairan dana terganggu
	Integrasi eksternal belum optimal	Belum terhubung dengan bank/LKPP	Efisiensi pengelolaan keuangan daerah
PELAPORAN	Keterbatasan fitur SIPD (AKLAP belum optimal)	Laporan belum lengkap sesuai regulasi, tidak fleksibel untuk kebutuhan pemeriksa	Kualitas pelaporan belum optimal
	Ketergantungan pada sistem pusat	Sistem sering down	Keterlambatan pelaporan hingga 2 minggu
	Dual system (SIPD & SIPKD)	Belum semua modul terintegrasi	Inefisiensi dan potensi inkonsistensi data

Sumber: Diolah peneliti, 2026

Penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). TAM menekankan bahwa persepsi

kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap suatu sistem informasi akan menentukan sejauh mana sistem tersebut diterima dan dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan SIPD yang dipahami dan digunakan dengan baik oleh pengguna diharapkan mampu meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, serta keandalan laporan keuangan, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan dan asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal.

Penelitian ini juga menggunakan Resource Based View (RBV) yang diperkenalkan oleh Barney (1991). RBV menekankan bahwa keunggulan organisasi diperoleh dari pengelolaan sumber daya internal yang bernilai, langka, tidak mudah ditiru, dan tidak mudah digantikan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, fokus RBV diarahkan pada efektivitas pemanfaatan SIPD sebagai aset strategis organisasi. Efektivitas SIPD membantu menjamin integritas prosedur dan data pelaporan, sementara SIPD ketika dimanfaatkan secara tepat berfungsi sebagai infrastruktur informasi yang meningkatkan pencatatan, konsolidasi, dan pelaporan keuangan.

Motivasi penelitian ini muncul seiring dengan adanya perubahan sistem yang signifikan dalam pengelolaan laporan keuangan di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan dari SIPD Moonlight ke versi baru yaitu SIPD Microservices. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam

meningkatkan efesiensi dan transparansi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, penting untuk memahami bagaimana peralihan sistem ini memengaruhi proses pengelolaan keuangan di tingkat daerah dan bagaimana kompetensi sumber daya manusia berperan dalam mengadaptasi serta memaksimalkan potensi SIPD setelah peralihan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Interpretif Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Blitar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah akan dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pemahaman aparatur terhadap program SIPD dalam penyusunan laporan keuangan pada BPKAD Kota Blitar?
2. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan laporan keuangan pada BPKAD Kota Blitar?
3. Bagaimana dampak implementasi SIPD dalam Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman aparaturnya terhadap program SIPD dalam penyusunan laporan keuangan pada BPKAD Kota Blitar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan laporan keuangan pada BPKAD Kota Blitar
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak implementasi SIPD dalam kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Blitar

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait pemahaman, implementasi, dan dampak implementasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Untuk Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu membagikan tujuan yang berguna bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, khususnya melalui pemahaman, implementasi, dan dampak implementasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Untuk Akademisi

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan secara akademis dalam kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan konseptual terkait pemahaman aparatur, penerapan SIPD, serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Untuk Pihak Lainnya

Diharapkan temuan dari penelitian ini bisa menjadi referensi dan landasan bagi studi-studi berikutnya.